ABSTRAK

Widia Nurul Utami, NIM 1213010173. *Kedudukan Ahli Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Kampung Naga Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.*

Indonesia sebagai negara hukum yang plural mengenal tiga sistem waris yang berlaku bersamaan, yaitu hukum waris Islam, adat, dan perdata. Masyarakat Kampung Naga menjadi contoh nyata keberlangsungan hukum adat di tengah keberadaan hukum nasional dan agama. Dalam adat setempat, pembagian warisan tidak membedakan anak laki-laki dan perempuan, bahkan anak perempuan dapat memperoleh bagian lebih besar dalam kondisi tertentu. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam hukum adat, terutama jika dibandingkan dengan ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga rumusan masalah utama: pertama, untuk mengetahui konsep hukum waris adat yang diterapkan di Kampung Naga terkait kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris; kedua, untuk menganalisis bagaimana sumber hukum adat membentuk sistem pembagian warisan di Kampung Naga; dan ketiga, untuk mengkaji tinjauan yuridis terhadap penerapan hukum waris adat tersebut dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional, khususnya terhadap kedudukan anak perempuan.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti ketentuan dalam Surah An-Nisa dan Pasal 176 KHI yang menetapkan perbandingan bagian anak laki-laki dan perempuan, dengan pendekatan *'urf* (adat kebiasaan) dalam hukum Islam. Kaidah-kaidah fiqh seperti "*al-'adah muhakkamah*" dan "*al-'urf mu'tabar*" dijadikan dasar untuk menilai validitas praktik hukum adat yang berlaku di masyarakat Kampung Naga, selama tidak bertentangan dengan syariat. Adat yang memberikan hak waris lebih besar kepada anak perempuan berdasarkan kontribusi sosial dianggap mencerminkan keadilan kontekstual dalam komunitas tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat Kampung Naga dan masyarakat yang terkait, sementara data sekunder diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu. Teknik analisis data mencakup reduksi data, penyajian data dalam bentuk naratif, serta analisis perbandingan antara norma-norma KHI dan praktik adat yang ditemukan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris adat Kampung Naga lebih fleksibel dalam menempatkan anak perempuan sebagai ahli waris dibandingkan sistem hukum Islam normatif. Sering kali, anak perempuan mendapat bagian lebih besar karena perannya menjaga rumah adat dan merawat orang tua. Sistem ini menekankan keadilan sosial berbasis kontribusi, sehingga harmonisasi hukum Islam dan adat perlu terus dikaji untuk mewujudkan keadilan yang sesuai nilai masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Waris Adat, Anak Perempuan, Kampung Naga.